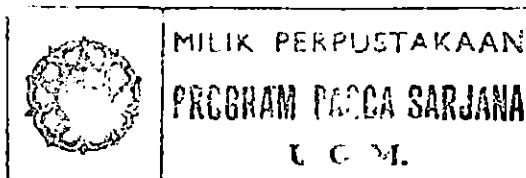


## ABSTRACT

*Polluted river water due to destructed forest, mining and population settlement have created lower quality of up-stream water that household generally consume. Considering scarce water, in 1996, Potable Water Management Unit (UPS-AB) of Kumpai Batu was founded as community association to participate in potable water preparation, development and maintenance. Potable water available have been broncaptering that government and local community built in 1997. UPS-AB of Kumpai Batu belongs to integrated water system of Kumpai Batu Atas, Kumpai Batu bawah and Terantang regard as function unit among other 67 UPS-ABs with potable water aid provided.*

*This study was conducted through field survey on 160 household selected using sample random method. Variable studied were availability of UPS-AB, involvement in decision making, involvement in activity, involvement in evaluation and social-economic condition of village community. Data were processed using descriptive an regression analysis with the use of Excel Programme and SPSS (Statistical Programme and Solution Service).*

*Result showed that availability of UPS-AB, involvement in decision making, involvement in activities, involvement in evaluation and social-economic condition of village community positively affected community participation in potable water management of 76.30 %. Community participation expected in potable water management were involvement in activity (78.89 %), availability of UPS-AB as association to participate (67,78 %), involvement indecision making (41.87 %) and social-economic condition of village community (30.48 %). Request to participate was true due to public need to obtain potable water service. Based on in-satisfaction ranking. Potable water service public demand were improvement and handling efforts on reported breakdown, payment method, water quality, water continuity, water quantity, officer attitude, and water meter condition.*





## INTISARI

Pencemaran air sungai yang disebabkan oleh pengrusakan hutan, pertambangan dan pemukiman penduduk mengakibatkan turunnya kualitas air sungai dibagian hilir yang umumnya digunakan penduduk untuk air konsumsi rumah tangga. Memperhatikan keterbatasan air bersih tersebut, pada tahun 1996 dibentuk unit pengelola sarana air bersih (UPS-AB) Desa Kumpai Batu sebagai wadah masyarakat untuk berperanserta dalam melakukan persiapan, pembangunan dan pemeliharaan sarana air bersih. Sarana air bersih yang tersedia adalah sistem perlindungan mata air yang dibangun oleh pemerintah pada tahun 1997 dan swadaya masyarakat. UPS-AB Kumpai Batu merupakan satu sistem dengan Desa Kumpai Batu Atas, Kumpai Batu Bawah dan Terantang yang dinilai berfungsi dari 67 UPS-AB yang mendapat bantuan sarana air bersih.

Penelitian dilaksanakan dengan survai lapangan terhadap kepala keluarga sebanyak 160 orang yang dipilih secara acak sederhana. Variabel yang diteliti adalah keberadaan organisasi Unit Pengelola Sarana Air Bersih (UPS-AB), keterlibatan dalam keputusan, keterlibatan dalam kegiatan, keterlibatan dalam penilaian dan kondisi sosial ekonomi masyarakat desa. Data diolah dengan analisa deskriptif dan analisa regresi dengan menggunakan program Excel dan program SPSS (*Statistical Programme and Solution Service*).

Hasil analisa menunjukkan bahwa variabel keberadaan organisasi Unit Pengelola Sarana Air Bersih (UPS-AB), keterlibatan dalam keputusan, keterlibatan dalam kegiatan, keterlibatan dalam penilaian dan kondisi sosial ekonomi masyarakat desa berpengaruh positif terhadap peranserta masyarakat dalam pengelolaan sarana air bersih sebesar 76,30 %. Peranserta masyarakat yang diinginkan dalam pengelolaan sarana air bersih adalah keterlibatan dalam kegiatan (78,89 %), keberadaan organisasi UPS-AB untuk wadah berperanserta (67,78 %), keterlibatan dalam pengambilan keputusan (41,87 %) dan kondisi sosial ekonomi masyarakat desa yang mendukung peranserta masyarakat (30,48 %). Keinginan untuk berperanserta karena kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pelayanan air bersih. Pelayanan air bersih yang dikehendaki oleh masyarakat sesuai ranking ketidakpuasan adalah perbaikan dan penanganan atas laporan gangguan, cara pembayaran, kualitas air, kontinuitas air, kuantitas air, sikap petugas dan kondisi meteran air.

